

# **BAB I**

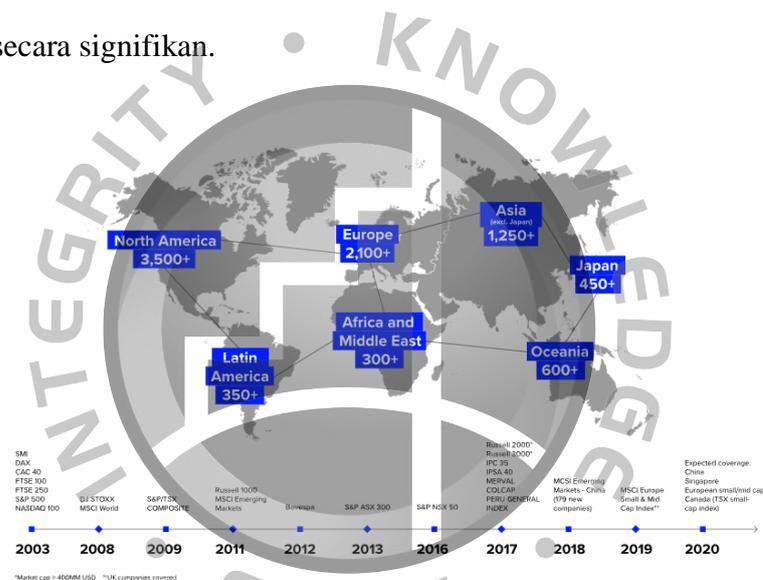
## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sejak krisis Ekonomi Global 2007-2009 masalah sosial, dan bencana lingkungan yang terkait dengan praktik manajemen risiko yang buruk, masalah pengembangan keberlanjutan menjadi perhatian utama semua negara (Tjahjadi et al., 2021). Menurut *United Nations Sustainable Stock Exchange*, semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi *Sustainable Development Goals* (SDG) pada tahun 2015 untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet ini dan memastikan kemakmuran pada tahun 2030. Di era pembangunan berkelanjutan, semua perusahaan dituntut oleh pemangku kepentingannya untuk meningkatkan kesadaran ketika menjalankan tanggung jawab perusahaan mereka. Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan (1987) juga menggambarkan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Keberlanjutan perusahaan dicapai dengan menggabungkan tiga komponen utama yaitu, meningkatkan efisiensi, pertumbuhan berkelanjutan, dan nilai pemegang saham. Oleh karena itu, pandangan berorientasi pemegang saham tradisional yang berfokus terutama pada memaksimalkan pengembalian finansial kepada pemegang saham telah berubah. Perusahaan menyadari pentingnya mengungkapkan informasi *Environment, Social, dan Governance* (ESG) yang

mencakup berbagai dimensi yang terkait dengan lingkungan, masyarakat, dan tata kelola (Alsayegh et al., 2020). Tarmuji et al., (2016) beranggapan Isu-isu ESG telah berubah menjadi antusiasme bagi spekulasi, pemegang saham, dan pemerintah sebagai perhatian manajemen risiko. Sementara bagi perusahaan, hal itu telah berubah menjadi bagian yang muncul dari strategi kompetitif mereka, karena informasi ESG merupakan pengungkapan non-keuangan dan tidak mengejar format standar seperti pengungkapan keuangan sehingga pengungkapan ESG cenderung bervariasi secara signifikan.



**Gambar 1.1 Jumlah perusahaan pengguna ESG Score dengan lingkup global**

Sumber: Refinitiv (2020)

Penggunaan prinsip-prinsip ESG pada perusahaan semakin berkembang seiring bertambahnya kepedulian *stakeholder* terhadap lingkungan dan sosial. Dari 2018 hingga 2020, lebih dari \$100 miliar mengalir ke dana spesialis ESG secara global (Barclays, 2020). Di Indonesia sendiri, emiten yang sudah mengimplementasikan prinsip-prinsip ESG pada tahun 2020 meningkat sebesar 40% jika dibandingkan dengan tahun 2019 (PWC, 2021). Bagi beberapa investor

dan perusahaan, penyebaran COVID-19 yang terjadi sejak tahun 2020 membuat kegiatan ESG menjadi mundur selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Namun, beberapa investor dan perusahaan beranggapan bahwa pandemic ini akan menyoroti perilaku ESG dan bahkan dapat mempercepat tren keberlanjutan tertentu (Barclays, 2020). Meningkatnya penggunaan ESG maka meningkat pula risiko ESG yang dapat terjadi. Luasnya faktor yang dilindungi oleh ESG dapat menyebabkan tidak meratanya implementasi dari ESG itu sendiri, maka perlu adanya mitigasi risiko sedini mungkin dengan meningkatkan kemampuan risiko tata kelola atau *Risk Governance* (RGOV) (Friede et al., 2015). *Risk Governance* yang bertujuan untuk membangun kekokohan perusahaan dalam mematuhi kerangka hukum dan peraturan dapat mengurangi bahkan menghilangkan risiko pada kinerja ESG (OECD, 2020), sehingga meningkatkan peluang dalam meningkatkan *resilience* perusahaan. Penerapan dasar-dasar risiko tradisional dan kontrol yang tepat, yang terdapat pada *Risk Governance*, dapat membantu perusahaan dalam memenuhi kewajiban kepatuhan terhadap peraturan terkait isu-isu ESG, mengurangi gangguan operasional yang dapat timbul dari kesadaran ESG yang buruk (bencana cuaca hingga pemogokan karyawan), serta membantu perusahaan untuk bertindak berdasarkan nilai-nilai perusahaan yang dipegang teguh oleh manajemen senior (Barclays, 2020).

Kelemahan dalam tata kelola terutama mencakup manajemen yang kurang memahami risiko yang mereka ambil dan dewan<sup>1</sup> yang tidak memperhatikan fungsi

---

<sup>1</sup> Indonesia menganut *two-tier system* sehingga dewan yang dimaksud merupakan Dewan Komisaris. Namun, negara Malaysia, Thailand, dan Filipina menganut *one-tier system* sehingga dewan yang dimaksud merupakan Direktur Independen (Nosheen et al., 2020)

manajemen risiko menjadi sebuah alasan utama melakukan pengawasan terhadap fungsi manajemen risiko melalui praktik risiko tata kelola atau *Risk Governance* (RGOV), seperti yang ditekankan oleh FSB (2013), BCBS (2015), dan OECD (2014). Manajemen risiko dalam struktur tata kelola perusahaan atau RGOV menurut BCBS (2015) bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, mengendalikan atau mengurangi, dan melaporkan eksposur risiko. Stulz (2016) mengatakan bahwa salah satu aspek penting dari tata kelola yang baik adalah dewan harus memiliki keahlian yang cukup untuk menilai upaya manajemen dalam mengukur dan mengelola risiko, sehingga perlunya penekanan dalam penggunaan RGOV pada level dewan. Keberhasilan suatu perusahaan pada dasarnya tergantung pada dewan direksi, mengingat mereka bertanggung jawab untuk menyetujui dan mengawasi pelaksanaan tujuan strategis, sistem tata kelola, dan menciptakan budaya perusahaan (Birindelli et al., 2018). Berbagai eksposur risiko, profil risiko, konsentrasi risiko, dan tren dilaporkan secara berkala oleh *Board Risk Management Committee* (BRMC) kepada dewan dan manajemen senior (CEO) karena mereka bertugas untuk menetapkan *risk appetite* dan prinsip-prinsip risiko. Maka dari itu, penerapan RGOV pada level manajemen sangat diperlukan agar risiko perusahaan dapat terstruktur dan dapat membantu perusahaan mengurangi risiko kerugian yang besar (Ellul & Yerramilli, 2013).

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian Karyani et al. (2020) yang menguji pengaruh *Risk Governance* terhadap *Return on Asset (ROA)*. Berbeda dengan penelitian Karyani et al. (2020), studi kali ini menghubungkan pengaruh *Risk Governance* dengan kinerja non keuangan yang diprosikan dengan

*Environment, Social, dan Governance (ESG)* sehingga penelitian ini berkontribusi dalam mengisi *research gap*. Pertama, studi yang menghubungkan *Risk Governance* dengan kinerja non keuangan yang diproksikan dengan ESG masih sangat terbatas. Studi sebelumnya lebih banyak menghubungkan *Risk Governance* dengan kinerja keuangan, misalnya penelitian Karyani et al. (2020), Nahar et al. (2016), Battaglia & Gallo (2015), Aebi et al. (2012), dan Hussain et al. (2018). Kedua, penelitian ini menggunakan subjek dari berbagai sektor sedangkan penelitian Karyani et al. (2020) berfokus kepada sektor perbankan. Ketiga, penelitian ini menggunakan fokus penelitian perusahaan negara-negara di ASEAN *Emerging Markets* yang memiliki kegiatan ekonomi terbesar serta tercatat sebagai anggota *Network for Greening the Financial System (NGFS)* yaitu Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Filipina sedangkan penelitian Karyani et al. (2020) menggunakan negara-negara ASEAN-5. Keempat, studi ini menambahkan periode 2020 dimana keadaan *New Normal* sedang diberlakukan akibat dari CfCOVID-19.

## 1.2 Identifikasi Masalah

*Risk Governance (RGOV)* menjadi topik yang baru dibandingkan *Corporate Governance* karena perbedaan kelembagaan dan sosio-ekonomi di negara berkembang dapat mempengaruhi pengaturan sistem tata kelola risiko secara berbeda. Negara-negara berkembang dicirikan oleh peraturan dan regulasi yang kurang efektif, lebih banyak korupsi, dan eksploitasi politik (Nahar et al., 2016), sehingga RGOV berguna untuk pengambilan keputusan yang optimal terkait dengan risiko dan memaksimalkan kepercayaan publik dalam proses, struktur, dan keputusan manajemen risiko. Terlebih lagi, saat ini sudah mulai memasuki Industri

5.0 yang berkonsep untuk memanfaatkan kreativitas unik para ahli manusia sebagai “pilot” untuk berkolaborasi dengan mesin yang kuat, cerdas, dan akurat sehingga dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan kepuasan pemegang kepentingan Maddikunta et al. (2021) Besarnya manfaat dari praktik RGOV telah mendorong beberapa lembaga keuangan internasional, seperti *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) dan *Financial Stability Board* (FSB), untuk merevisi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan mereka dengan memasukkan RGOV.

*Environment, Social, dan Governance* (ESG) menjadi hal baru menggantikan *Corporate Social Responsibility* setelah isu-isu ESG dapat menjadi materi finansial sehingga tumbuhnya kesadaran publik yang menyebabkan peningkatan jumlah perusahaan yang menggunakan strategi keberlanjutan dan mengungkapkan informasi ESG secara global (Xie et al., 2019). Perusahaan yang mengeluarkan ESG dianggap memiliki serangkaian kebijakan dan praktik operasi yang menguntungkan lingkungan sehingga menciptakan nilai ekonomi bagi perusahaan itu sendiri. Integrasi strategi ESG dalam manajemen memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan keunggulan kompetitif, meningkatkan efisiensi dan reputasi operasional, dan pengurangan pemborosan sehingga meningkatkan nilai bersama dan keberlanjutan perusahaan. Keberlanjutan perusahaan sangat bergantung dengan kondisi perusahaan saat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan era teknologi sehingga dapat menciptakan nilai tambah perusahaan tersebut (*competitive advantage*) dibanding pesaingnya.

### 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang dan juga identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah RGOV mempengaruhi Kinerja ESG perusahaan?
2. Apakah Struktur RGOV Tingkat Dewan mempengaruhi Kinerja ESG perusahaan?
3. Apakah Struktur RGOV Tingkat Manajemen mempengaruhi Kinerja ESG perusahaan?

### 1.4 Ruang Lingkup Masalah

Pembatasan masalah dilakukan penulis dengan tujuan agar dapat fokus pada penelitian yang dilakukan dan membuahkan kesimpulan yang baik. Maka dari itu, dapat disusun ruang lingkup masalah yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu:

1. Data-data yang digunakan pada penelitian ini meliputi perusahaan yang terdaftar pada indeks ESG dan mempublikasikan laporan keuangannya di Bursa Efek Indonesia, *The Stock Exchange of Thailand*, Bursa Malaysia, dan *The Philippine Stock Exchange* periode 2016-2020
2. Penelitian ini hanya berfokus membahas masalah yang berkaitan dengan *Risk Governance* (RGOV) yang dipengaruhi oleh kinerja *Environment*, *Social*, dan *Governance* (ESG).

### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah pada penjelasan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menunjukkan pengaruh RGOV terhadap Kinerja ESG perusahaan
2. Untuk menunjukkan pengaruh Struktur RGOV Tingkat Dewan terhadap Kinerja ESG perusahaan
3. Untuk menunjukkan pengaruh Struktur RGOV Tingkat Manajemen terhadap Kinerja ESG perusahaan

### 1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi beberapa pihak yaitu:

1. Bagi Para Akademik

Penelitian ini memberi manfaat tambahan pengetahuan terkait pengaruh *Risk Governance* (RGOV) terhadap Kinerja *Environment, Social, dan Governance* (ESG) perusahaan di Negara *ASEAN Emerging Markets*. Diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai referensi penelitian yang akan datang.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan bukti pengaruh *Risk Governance* (RGOV) terhadap Kinerja *Environment, Social, dan Governance* (ESG) perusahaan di Negara *ASEAN Emerging Markets*. Sehingga, perusahaan dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan saat mengendalikan *Environment, Social, dan Governance* (ESG) dengan *Risk Governance* agar memaksimalkan *sustainability* perusahaan.

3. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi lebih mengenai pentingnya mengelola *Risk Governance* dan pengungkapan ESG dari sebuah perusahaan agar dapat membantu investor dalam menentukan keputusan investasinya.

#### 4. Bagi Regulator

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi informasi baru untuk pihak regulator selaku pengawas dan pembuat kebijakan. Lalu, penelitian ini juga memberikan saran dan masukan untuk regulator dalam membuat kebijakan agar perusahaan bisa lebih memperhatikan risiko dalam tata kelola perusahaan (*Risk Governance*) agar keberlanjutan perusahaan dapat terjadi.

### 1.7 Sistematika Penulisan

Untuk menciptakan pemahaman dari materi yang diperoleh pada penelitian ini, maka penulis menerangkan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab dengan penyajian sebagai berikut:

#### 1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. Komponen lain yang dijelaskan dalam bab ini meliputi identifikasi masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistemasuka penelitian.

#### 2. BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang pembahasan pada landasan teori yang menjelaskan teori-teori dan pengertian-pengertian dasar yang digunakan

oleh penulis dalam memecahkan masalah. Bab ini juga menjelaskan terkait teori-teori yang berhubungan erat dengan pokok pembahasan yang diuraikan dalam satu landasan teori, hasil penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran, dan juga hipotesis penelitian.

### 3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai deskripsi bagaimana penelitian ini dilakukan secara operasional. Pada bab ini akan dijabarkan apa saja data-data penelitian, variabel-variabel yang digunakan, definisi operasional dari variabel penelitian, sampel penelitian, jenis dan sumber data, serta metode pengumpulan data atau metode analisis data yang digunakan.

### 4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjabarkan terkait deksripsi objek penelitian, analisis data yang digunakan dan interpretasi serta argument dari hasil penelitian

### 5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini yakni merupakan bagian terakhir dari penulisan skripsi. Pada bab ini berisi kesimpulan yang menyajikan secara singkat pokok penting dari pembahasan, keterbatasan yang meliputi kelemahan dari penelitian, dan saran bagi pihak-pihak yang bekepentingan dari hasil penelitian serta saran untuk penelitian yang akan datang.